



Lelang Fisik Tetap Jalan

Lelang Fisik Tetap Jalan

MAKASSAR, FAJAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menanggapi permintaan Fraksi Mulia DPRD Makassar yang meminta agar lelang kegiatan fisik ditunda. Danny, panggilan akrabnya, mengaku tetap akan melaksanakan lelang tersebut.

Menurutnya, keinginan dewan tersebut tidak berdasar. "Dasarnya apa? Kecuali kalau mereka punya (proyek) yang mau ditunda," ujar Danny.

❖❖ Baca Lelang... Hlm 11

Lelang Fisik Tetap Jalan

❖❖ Lanjutan Halaman... 9

Terkait dengan edaran pusat, Danny menilai, yang dimaksud adalah dana transfer daerah, bukan APBD. Tidak ada larangan untuk melaksanakan lelang dan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh ditunda, karena belanja harus tetap dilakukan.

"Itu kan sudah jelas sekali sifatnya. Apa mau kau belanja nanti. Mau bayar petugas sampah dan lain-lain. Masa tidak ada jalan?" ucapnya.

Bahkan, kata Danny, seharusnya lelang tersebut dipercepat, karena dirinya bukan Penjabat (Pj), tetapi Wali Kota definitif. Meskipun Pj pun harus tetap menjalankan kegiatan, saat ini belum ada lelang yang dilakukan karena masih banyak yang perlu disiapkan.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik anggaran 2025. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan program-program pembangunan sejalan dengan visi dan misi Wali Kota terpilih yang akan memimpin Makassar pasca-Pilkada 2024.

"Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbau-

an Presiden Prabowo," ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad.

Senada dengan Ray, Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura, Muchlis A Misbah, yang juga Bendahara Fraksi Mulia, turut mendukung langkah ini.

Ia menegaskan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi keberlanjutan pembangunan yang terarah.

Arahan ini menjadi penting mengingat pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran. Sebab Pilkada 2024 sendiri

telah menjadi momentum penting bagi warga Makassar dalam menentukan arah masa depan kota Makassar.

Dengan ditundanya lelang kegiatan fisik, menurutnya, pemerintah transisi bisa mempersiapkan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru.

"Iyalah, jangan dilelang dulu dong kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya. Ini agar program yang dijalankan betul-betul mencerminkan visi pemimpin baru," tegas Muchlis. (mum/ham)